

DILEMA SEKOLAH KEJURUAN: ANTARA KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN KEPENTINGAN POLITIK

Mas'odi
(Dosen PJKR STKIP PGRI Sumenep)
Bangodi13@gmail.com

Abstrak

Beberapa tahun lalu pemerintah kita memiliki kebijakan dalam dunia pendidikan yaitu menginginkan sekolah kejuruan lebih banyak ketimbang SMA. Hal ini timbul dikarenakan sebuah analisa lapangan bahwa pengangguran produktif paling banyak dari lulusan SMA. Sekolah Menengah Atas (SMA) dimaksudkan bagi lulusan yang memang ingin melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi, sehingga pembekalan skill bisa dikatakan tidak ada. Mereka seolah hanya diasah pemikirannya menjadi insan yang cerdas in telektual. Sedangkan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) mereka harus menguasai skill tertentu bahkan diharapkan mereka (lulusannya) dapat membuat lapangan pekerjaan. sehingga banyak dari perusahaan/tempat-tempat kerja yang membutuhkan lulusan-lulusan tertentu dari SMK.

Kata kunci : Kejuruan, Skill, pengangguran

Abstract

Several years ago our government has policies in education are vocational schools want more from high school. This occurs because the analysis of the productive areas of unemployment, mostly high school graduates. School (SMA) is intended for graduates who want to continue to pursue higher education , so that skills can be said debriefing . They seemed only to sharpen his thinking into a creature thinker. While vocational schools (SMK) they must master specific skills even expected them (graduates) can make a field of works. So there are many companies / workplaces that require graduates of vocational school

Keyword : Vocational, Skill, unemployment

A. Pendahuluan

Bangsa kita sangatlah kaya baik dari segi Sumber Daya Manusianya ataupun bahkan dari sisi lain jika lihat dengan kasat mata Sumber Daya Alam yang kita punya sangatlah melimpah ruah. Akan tetapi apakah semua itu sudah dimanfaatkan/diolah dengan baik sehingga semua itu bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia pada umumnya? sebuah pertanyaan mendasar yang harus kita jawab bersama.

Tentu hal itu belum bisa terwujud karena keadaan bangsa sekarang tidak seperti yang dibayangkan. Ini karena pemerintah Indonesia yang belum dapat mengefesiensikan sumber daya alam dan manusianya yang melimpah ruah. Faktanya, banyak warga Indonesia yang tidak memiliki pekerjaan atau dengan kata lain pengangguran di negaranya sendiri. Semakin tingginya tingkat kelahiran warga Indonesia namun tidak dibarengi dengan banyaknya lapangan kerja yang tersedia, membuat jumlah pengangguran di Indonesia menjadi semakin tinggi. Bahkan rela menjadi tenaga kerja di Negara lain dengan menjadi tenaga kerja wanita (TKW) ataupun tenaga kerja Indonesia (TKI). Tentu hal ini sangat miris sekali bisa terjadi di negeri yang sangat kaya raya ini.

Secara kasat matapun jawaban itu bisa kita lihat, ternyata kekayaan alam yang kita miliki tidak bisa kita nikmati sendiri, hanya beberapa persen darinya yang kita bisa terima. Sungguh hal ini juga yang membuat keprihatinan oleh Soedijarto (2008), Ia bertanya-tanya “apa yang salah dengan strategi pembangunan Indonesia sehingga setelah 71 tahun merdeka belum juga menjadi bangsa yang cerdas kehidupannya, dan sejahtera kehidupan rakyatnya”.

Hal ini menggambarkan bahwa bangsa Indonesia belum cerdas sehingga masih banyak hal yang terjadi dan itu menyusahkan masyarakat Indonesia, baik dari kekeringan, banjir, bencana alam yang semua itu tidak bisa ditangani sendiri oleh bangsa kita Soedijarto (2008). Masalah yang tidak kalah peliknya adalah masalah pengangguran yang semakin hari semakin banyak bak jamur yang selalu berkembang.

Hal ini terjadi akibat banyak lulusan sekolah yang sudah mempunyai kriteria bekerja, akan tetapi dalam teknisnya keterampilannya masih kurang. Sehingga susah dalam mencari pekerjaan dengan kata lain sangat minimnya keterampilan yang dimiliki oleh lulusan tersebut.

Tentunya hal ini harus disikapi oleh berbagai pihak khususnya bagi para pemangku kebijakan. Hal ini karena permasalahan telah menjadi permasalahan Nasional yang harus segera dicarikan solusinya.

B. Solusi Versus Politis

Melihat permasalahan yang telah dihadapi bangsa kita saat ini maka

pemerintah membuat satu kebijakan dimana kebijakan tersebut merujuk pada rencana strategis 2005-2009 yaitu untuk mengurangi pengangguran terdidik lulusan sekolah menengah atas yang sangat banyak yaitu 65%. Maka melihat fenomena permasalahan tersebut Kementerian Pendidikan Nasional berencana menempatkan 70 persen siswa menengah atas di sekolah kejuruan dan 30 persen sisanya di sekolah umum pada tahun 2015, perbandingan 70:30. Dan hal ini sudah mulai berjalan sampai saat ini.

Tentunya kita berharap kebijakan ini tidak berbau kepentingan antar kelompok pemangku jabatan ataupun di masing-masing sekolah yang ada di lapangan. Meskipun pada kenyataannya semua kebijakan yang dibuat oleh pemerintah semuanya bersifat politis. Akan tetapi semua berharap kebijakan tersebut tetap berpihak pada rakyat.

Seperti yang kita ketahui bahwa saat ini banyak sekali bermunculan sekolah-sekolah baru yang menamakan dirinya dengan sekolah vokasi, yang lebih kita kenal dengan kata SMK yaitu Sekolah Menengah kejuruan. Semua itu tidak terlepas dari adanya kebijakan pemerintah yang mengeluarkan kebijakan yang sangat *fantastis* yaitu 70:30 sekolah kejuruan berbanding sekolah umum. Hal inilah yang membuat sekolah-sekolah yang dulunya sekolah umum sekarang “banting stir/belok arah” menjadikan sekolah yang dikelolanya dengan menjadi sekolah kejuruan. Bahkan bermunculan/ berlomba-lomba untuk

membuat sekolah kejuruan yang baru meskipun sekolah baru tersebut sangatlah tidak memenuhi standard pelaksanaan, baik dari pengajar ataupun sarana dan prasarannya. Tentunya hal tersebut terjadi tidak lain agar bisa mendapatkan perhatian dana) dari pemerintah.

Setelah lajir kebijakan tersebut yang mengacu pada renstra kemendiknas maka terjadilah fenomena alih status dari SMA menjadi SMK. Hal ini terjadi karena banyak sekolah yang notabene SMA mengalami kekhawatiran akan berkurangnya minat calon siswa untuk masuk melalui jenjang sekolah menengah atas. Selain itu banyak masyarakat yang beranggapan bahwa lulusan SMA hanya dipersiapkan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi/ perguruan tinggi, sehingga bekal keilmuan yang diberikan bersifat umum tanpa memberikan pengetahuan keterampilan.

Selain itu semakin kecilnya kesempatan lulusan SMA untuk melanjutkan ke perguruan tinggi akibat mahal biaya pendidikan membuat peminat SMA yang terus menurun. Sejumlah SMA pun beralih status menjadi SMK karena bekal keterampilannya lebih banyak sehingga lebih mudah mencari pekerjaan.

C. Kecerdasan intelektual Versus kecerdasan emosional

Jika dilihat dari cita-cita para pengembang ataupun pembuat kebijakan sangatlah mulia. Dimana kebijakan tersebut dibuat yaitu untuk mengurangi angka pengangguran di Indonesia, terutama pengangguran terdidik. Dengan adanya kebijakan tersebut juga diharapkan dapat

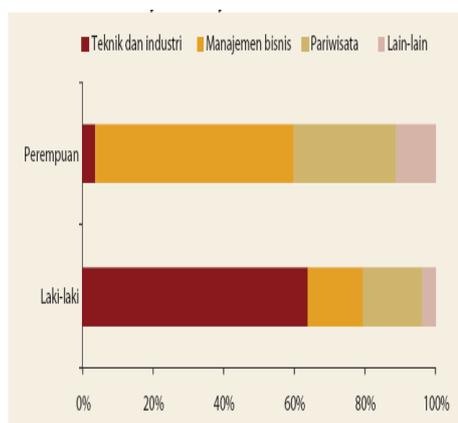
membantu memberikan keahlian tertentu dan spesifik bagi para peserta didik agar bisa diterima oleh para pemberi kerja (Amsberg, 2010). Maka sudah menjadi tugas dan tantangan para pembuat kebijakan yaitu mengidentifikasi cara terbaik untuk meningkatkan pasokan pekerja berkeahlian masa depan (Amsberg, 2010).

Kebijakan ini sudah berjalan dan kini semakin banyak siswa mendaftar ke sekolah kejuruan. 1.211 sekolah kejuruan tambahan telah didirikan dari 2006-07 sampai 2008-09. Dalam periode yang sama, 375 sekolah umum ditutup (Amsberg, 2010). Terlepas dari kebijakan yang sangat mulia itu kita melihat sungguh sangat ironi ketika sekolah-sekolah umum yang telah berdiri sejak lama kini ditutup ataupun dijadikan sekolah kejuruan. Kita bisa bayangkan akan jadi seperti apa masyarakat/pemuda yang dulunya diharapkan menjadi penerus bangsa.

Sudah jelas bisa kita tebak para pemuda-pemudi Indonesia akan menjadi "buruh" yang hanya bergantung kepada orang lain, atau mungkin paling tidak mereka akan menjadi pekerja sejati (worker) bukan lagi sebagai pemikir (*thinker*). Kebijakan ini juga disinyalir tidak dilakukan analisis empiris secara menyeluruh. Kebijakan ini bahkan telah dilakukan oleh Korea Selatan jauh sebelum Indonesia yaitu pada tahun 90-an yang diharapkan angka partisipasi sekolah menengah kejuruan dapat meningkat, akan tetapi sebaliknya hal itu justru menurun

pada tahun 1995-2005. Sungguh sangat disayangkan para pengambil kebijakan jika tidak 'berkaca' pada Negara tersebut yang ternyata kebijakan tersebut banyak mengalami kejanggalan ataupun kegagalan dilapangan.

Akibatnya adalah terjadi penyimpangan-penyimpangan dan ketimpangan seiring berjalannya kebijakan tersebut. Selain itu adanya kebijakan tersebut ternyata lebih banyak hanya dinikmati oleh para laki-laki saja sesuai dengan laporan Amsberg tahun 2010 yang menyatakan "semakin banyak siswa telah mendaftar di sekolah kejuruan. Sebagian besar dari peningkatan tersebut merupakan pendaftaran di sekolah kejuruan swasta yang menyerap lebih banyak siswa laki-laki daripada perempuan". Seperti inilah jika ditampilkan dalam sebuah tabel:



Sumber: Amsberg 2010

Jika hal ini terus terjadi maka kesejahteraan hanya akan dinikmati oleh para kaum laki-laki saja yang juga menyalahi aturan tentang kesetaraan gender ataupun education for all (EFA).

Selain anak akan dipaksa menjadi seorang pekerja (worker), anak tersebut juga bahkan dengan sadar tidak akan membangun tradisi berfikir ilmiahnya (thinker). Karena mereka hanya akan terfokus pada pekerjaan yang mereka akan dapatkan nanti setelah mereka lulus, dan sedikit dari mereka yang akan melanjutkan studi mereka ke tingkat yang lebih tinggi. Kebanyakan dari mereka akan berfikir "yang penting dapat bekerja dan menghasilkan uang". Maka hilanglah amanat UUD 1945 bangsa Indonesia yang ingin mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kebudayaan nasional dan hanya akan menjadi pemasok defisit keuangan Negara.

Zaman yang kita hadapi saat ini dipenuhi dengan kemajuan teknologi modern nan canggih dan tidak dapat diterka oleh otak orang awam. Bahkan tidak bisa dipungkiri nantinya tambah lama akan tambah maju pula pekungannya. Sehingga sebagai pengelola pendidikan terlebih lagi sekolah kejuruan yang identik dengan berbagai peralatan yang canggih harus mempunyai visi yang cukup tajam untuk menatap visi masa depan pendidikan. Maka dengan begitu harus diingat prinsip dari pendidikan itu sendiri bahwa pendidikan bukanlah membentuk sebuah manusia (menjadi robot), akan tetapi membentuk pribadi manusia yang bermoral dan spiritual (Sahertian, 2000).

Jika dilihat dari sisi yang lain sekolah kejuruan ini bisa jadi hanya mengunggulkan Intelegensi semata karena

yang dipertimbangkan hanyalah bagaimana anak didik mempunyai keterampilan. Ia (sekolah kejuruan) hanya “concern” dengan masalah pembangunan dan kesejahteraan pada masa industrialisasi dan globalisasi saat ini (Tilaar, 2006). Jika hal itu yang terus dipertahankan maka akan menjadi sangat percuma. Karena para pekerja yang bisa diterima bukan hanya mereka yang terampil/cerdas secara integensi akan tetapi juga cerdas dari segi emosional dan spiritual (Goleman, 2001)

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Supriadi (2006) menunjukkan bahwa peranan pemerintah dalam pembiayaan pendidikan terdapat perbedaan meskipun tidak terlalu signifikan antara SMU dan SMK berbanding 78%:79%. Hal ini jelas bahwa pemerintah lebih “condong” perhatiannya terhadap SMK.

Akan tetapi jika dilihat dari aspek yang lain sekolah kejuruan ini sangat membantu dalam mengurangi masalah pengangguran dan agar siap dalam menghadapi dunia kerja. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Bakry (2011) mengatakan bahwa Pendidikan kejuruan memiliki daya dukung representatif atas pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional dan SMK lebih mudah masuk ke pasar kerja daripada lulusan SMA karena umumnya matapelajaran di SMK sudah disertai dengan praktik keterampilan.

Selain itu pada saat ini banyak orang tua yang beranggapan bahwa pendidikan kejuruan kelak dapat membantu

anak-anaknya berkiprah di dunia kerja dan industri seiring bergulirnya zaman yang sangat sulit menemukan ataupun menciptakan pekerjaan. Sehingga dengan adanya SMK akan membantu anak-anak mereka agar bisa memiliki keahlian tertentu.

Untuk mendukung agar hal tersebut bisa tercipta dengan yang diharapkan, maka sistem pengelolaan dan materi pembelajaran (kurikulum) untuk siswa SMK harus disesuaikan dengan kebutuhan keterampilan oleh industry, perusahaan ataupun “stakeholder”. Selain itu juga dibutuhkan dukungan dari pemerintah untuk melakukan peningkatan jumlah SMK secara proporsional termasuk upaya penataan bidang keahlian dan program studi di SMK serta fasilitas magang agar relevan dengan kebutuhan dunia kerja (Renstra Kemendiknas 2004-2009).

Dunia pendidikan merupakan salah satu komponen penting dalam dunia ketenagakerjaan, khususnya dalam komponen kedua yang itu bisa dipenuhi oleh SMK (pada jenjang Sekolah menengah) maupun pendidikan Vokasi (pada jenjang Pendidikan Tinggi) (Premano,2010).

Dalam pengembangan serta terserapnya lulusan sekolah kejuruan tersebut maka haruslah ada sinergi antara dunia pendidikan dan dunia industry/ stakeholder agar lulusannya memiliki kompetensi yang dibutuhkan dunia industri. Sehingga bisa langsung bekerja

dibidangnya. Jika hal ini tidak dilakukan apa bedanya nanti dengan sekolah menengah umum yang disinyalir sebagai penyumbang pengangguran terdidik di Negara kita.

Saran bagi para pendiri sekolah kejuruan sekiranya membuka jurusan yang tidak terlalu banyak pesaingnya didalam dunia kerja sehingga bisa cepat terserap. Selain itu mengadakan MoU dengan perusahaan-perusahaan/industry terkait agar memudahkan para lulusan untuk mencari ataupun mengamalkan ilmu yang telah mereka pelajari.

Selain itu yang tidak kalah pentingnya adalah tetap menjunjung tinggi UUSISDIKNAS No 20 tahun 2003 pasal 1 yang berbunyi:

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Dengan tetap berpegang teguh pada undang-undang yang ada maka para lulusan akan mempunyai pegangan hidup, semangat, motivasi, pantang menyerah, dan kreatif dalam bersaing (secara sehat) dalam kehidupan ataupun di dunia kerja.

D. Mimpi berbanding terbalik dengan kenyataan

Setelah kebijakan tersebut diberlakukan bagaimana realita yang terjadi? Sebuah tanda Tanya besar

tertanam dikepala kita, saat melihat data yang dikeluarkan oleh kantor Biro Pusat Statistik tentang angkatan kerja Indonesia dan penyerapan dunia kerja.

Sumber: BPS/DA DESAM BPS 2014 - 2015

DATA ANGKATAN KERJA & YG BEKERJA

JENIS KEGIATAN	TAHUN			
	2014		2015	
	AGUSTUS	AGUSTUS	AGUSTUS	AGUSTUS
	JUTA	%	JUTA	%
ANGKATAN KERJA	121.87		122.38	
YANG BEKERJA	114.63	94.06	114.82	93.82
< SD	53.96	44.28	50.83	41.53
SMP	20.35	16.70	20.7	16.91
SMA	18.58	15.25	19.81	16.19
SMK	10.52	8.63	11.8	9.64
D/II/III/IV	2.96	2.43	3.14	2.57
UNIVERSITAS	8.26	6.78	10.02	8.19
PENGGUGURAN	7.24	5.94	7.56	6.18

Grabs: INAPEN

Setelah diamati ternyata mimpi berbanding terbalik dengan kenyataan. Padahal semestinya sesuai dengan tujuan pembentukan atau pendirian SMK ini adalah untuk menyiapkan tenaga terampil untuk mengisi lowongan pekerjaan dengan keterampilan tingkat menengah, sesuai dengan klasifikasi dan kebutuhan perusahaan dan juga rencana strategis 2005-2009 yaitu untuk mengurangi pengangguran terdidik lulusan sekolah menengah atas yang sangat banyak yaitu 65%. lalu mengapa justru mereka yang telah dipersiapkan ini justru tidak bisa mengisi tempat pekerjaan yang sebenarnya sudah dipersiapkan untuk mereka. Lalu bagaimana dengan tenaga kerja masyarakat Indonesia mempersiapkan diri menghadapi pasar bebas Asean, serta bagaimana mereka dapat bersaing dengan para pekerja asing yang mulai datang membanjiri negara tercinta ini.

Akan tetapi setelah melihat data BPS tersebut, sepertinya terjadi penyimpangan ataupun kesalahan. Ternyata justru mereka yang tamat SMK tersebut kurang terserap oleh pasar tenaga kerja. Sebelum lowongan yang seharusnya

diisi oleh para tamatan SMK tersebut ditempati oleh pekerja asing yang datang menyerbu Indonesia sebagai imbas telah dibukanya dengan resmi masyarakat Ekonomi Asean tersebut.

E. Penutup

Kebijakan pemerintah ini pada dasarnya memang diharapkan dapat mengurangi pengangguran terdidik yang terjadi di Negara kita. Selain itu kebijakan ini juga ingin memberikan bekal skill yang memadai untuk lulusan sekolah menengah khususnya kejuruan sehingga timbullah kebijakan 70:30. Kebijakan tersebut tidak serta merta menjamin dapat memberikan jaminan bahwa lulusan SMK bisa mendapat porsi lebih besar dalam hal lapangan pekerjaan ketimbang lulusan SMA. Tentunya hal ini juga harus dibarengi dengan kesadaran para lulusan tersebut bahwa ilmu itu berkembang dan ilmu yang telah didapat juga harus dikembangkan dengan ilmu-ilmu lain yang tidak mereka dapatkan disekolah. Semisal mengikuti pelatihan, seminar, kursus ataupun magang. Hal ini tentu perlu dilakukan agar dapat meningkatkan kualitas diri dan kompetensi dan bersaing dalam dunia kerja yang akan merka hadapi.

DAFTAR PUSTAKA

Aminuddin Bakry. 2011. *Reorientasi Kebijakan Dan Pengelolaan Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan (PTK) Di Era Desentralisasi*, Jurnal MEDTEK, Volume 3, Nomor 2

Amsberg, Joachim von. 2010. *Laporan Ketenagakerjaan di Indonesia Menuju terciptanya pekerjaan yang lebih baik dan jaminan perlindungan bagi para pekerja*. Wahington, D.C. Bank Dunia.

Premano,Agung. 2010. *Kompetensi Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan Antara Kebijakan dan Realita*. Jurnal pendidikan penabur. No.15/Tahun ke-9

Soedijarto, prof, Dr, MA. 2010. *Landasan dan arah Pendidikan nasional Kita*. Jakarta. Kompas

Supriadi, Dedi. 2006. *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya.

Sahertian, Piet A. 2000. *Konsep Dasar & Teknik Supervisi pendidikan Dalam rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia*. PT Rineka Cipta. Jakarta

Goleman, Daniel. 2001. *Working With Emotionnal Intelligence:kecerdasan Emosi Untuk mencapai puncak Prestasi*. Jakarta: Gramedia.

Tilaar, H.A.R. 2006. *Manajemen Pendidikan Nasional: Kajian Pendidikan Masa Depan*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya

UUSISDIKNAS No 20 tahun 2003

Renstra Kemendiknas 2004-2009